

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi. Bab ini berisi tentang tulisan peneliti mengenai simpulan dan rekomendasi dari penelitian berjudul “*Kebijakan Chhnam Saun Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979)*”. Simpulan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sebelumnya diajukan. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dibuat peneliti melingkupi kondisi Kamboja dalam bidang sosial sebelum pelaksanaan kebijakan *chhnam saun*, gambaran umum pemerintahan Kamboja di bawah rezim Khmer Merah (1975-1979), upaya-upaya yang dilakukan Khmer Merah dalam menjalankan kebijakan *chhnam saun* di Kamboja (1975-1979), dan reaksi dalam negeri dan dunia internasional akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap kehidupan masyarakat Kamboja. Selanjutnya rekomendasi pada bab ini ditulis guna memberi sumbangsih masukan kepada pihak-pihak yang kiranya membutuhkan hasil penelitian.

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV, penelitian ini dapat disimpulkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, perihal kondisi Kamboja dalam bidang sosial sebelum pelaksanaan kebijakan *chhnam saun* (1970-1975). Pada saat pemerintahan Lon Nol, jumlah masyarakat Kamboja kurang lebih sebanyak 7 juta jiwa. Penduduk Kamboja didominasi oleh etnis Khmer. Di samping itu, terdapat etnis lain seperti melayu-cham, keturunan Vietnam, keturunan Cina, dan lain-lain. Keturunan Vietnam dan Cina lebih mendominasi bidang perekonomian di Kamboja. Sebagian besar dari mereka bermukim di kota-kota dengan bekerja sebagai pedagang dan pengusaha. Sedangkan etnis Khmer yang menjadi mayoritas di Kamboja mendominasi bidang perpolitikan dengan sebagian besar yang menetap di pedesaan sebagai petani. Penduduk Kamboja memang bergantung pada hasil pertanian. Beras menjadi komoditas utama Kamboja dalam bidang pertanian. Selain itu, karet menempati posisi kedua sebagai hasil utama sektor perkebunan. Wilayah Kamboja yang

terdapat banyak anak sungai menjadikan sebagian penduduk juga berkecimpung di bidang perikanan.

Dalam konteks keadaan agama pada masa Lon Nol, Kamboja merupakan negara yang berisi berbagai agama dan kepercayaan dengan penganut mayoritas beragama Buddha. Pribumi Kamboja, dalam hal ini yaitu etnis Khmer sangat jarang memeluk agama lain, misalnya Islam. Sebagian besar masyarakat tetap bertahan dalam menganut agama Buddha. Islam merupakan agama besar kedua di Kamboja. Populasi sebagian besar berasal dari etnis Cham. Muslim Kamboja menunjukkan stratifikasi dalam bidang keagamaan yang cukup teratur. Terdapat *tuon*, imam, dan hakim. Lalu pemimpin Islam di tingkat daerah yang dinamakan *Kadi Daerah* dan pada tingkat provinsi disebut *Kadi Khet*. Hampir seluruh Muslim Kamboja menganut mazhab Syafi'i, kecuali Cham Jahed atau Cham Bani. Muslim Kamboja layaknya Muslim di negara-negara lain yang menjalankan puasa Ramadhan, lebaran, hari raya Iduladha, khitan, dan lainnya.

Pada masa sebelum Khmer Merah berkuasa, peran umat Islam cukup signifikan. Umat Islam terlihat berhubungan baik dengan pemerintah. Terlihat dari mereka yang diberikan kepercayaan dalam penugasan penting tertentu. Semisalnya ketika akan membendung Vietnam dalam mewujudkan komunis Indocina di bawah hegemoni Vietnam. Rezim Lon Nol pun banyak memberikan pelayanan, fasilitas, dan jabatan penting bagi umat Islam. Di bawah kepemimpinan Lon Nol pun telah dibuat dua institusi yang masing-masing bernama *Association des Khmer Islam* (AKI, Persatuan Orang Khmer Islam) dan *Association de la Jeunesse Islamic Khmer* (AJIK, Persatuan Pemuda Khmer Islam).

Secara keadaan etnik dan kultural, negara Kamboja merupakan suatu negara yang tergolong multietnik serta mempunyai kemajemukan budaya. Hal ini dapat disimpulkan dari banyaknya etnik yang berada di Kamboja. Pembauran antara orang Khmer dan orang Cina telah berlangsung secara luas. Sedangkan perkawinan campuran dengan orang Vietnam jauh lebih sedikit akibat tidak kepercayaan orang Khmer kepada orang keturunan Vietnam yang sudah berakar secara turun-temurun. Selain itu, pembauran antara etnis Khmer dengan orang Melayu Cham mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh faktor agama.

Selanjutnya, perihal gambaran umum pemerintahan Kamboja di Bawah Rezim Khmer Merah (1975-1979). Dalam konteks perkembangan Khmer Merah, sejak masa raja Monivong tahun 1940, para penganut ideologi komunis sudah ada. Akan tetapi, komunisme Kamboja yang terorganisasi dimulai pada tahun 1951 ketika Partai Komunis Indocina membawahi tiga organisasi komunis yang berada dalam wilayah Indocina, yakni Vietnam, Laos, dan Kamboja. Mereka saling bekerja sama dalam perjuangan bersenjata melawan Prancis. Menurut beberapa sumber, nama pasti organisasi di Kamboja itu ialah *Khmer People's Revolutionary Party* (KPRP) atau Partai Revolusi Rakyat Khmer.

Pada masa Sihanouk, banyak dari kader komunis yang menjadi sasaran pembunuhan. Hanya tersisa ratusan kader aktif yang tersebar di dua zona besar. Zona timur yang berpusat di Kampong Cham di bawah So Phim dan zona tenggara yang berpusat di Provinsi Takeo di bawah kepemimpinan Chhit Choeun dan Ta Mok. Sihanouk melakukan tindakan “perburuan” terhadap komunis karena mereka selalu membuat ulah dengan melakukan pemberontakan pada masa pemerintahannya. Perburuan membuat kekosongan kekuasaan. Hal ini menjadi langkah awal bagi Pol Pot, Khieu Samphan, Noun Chea, dan Ieng Sary untuk mengisi kekosongan tersebut. Sejak saat itu mereka mulai mendominasi KPRP dan memainkan peran penting dalam tubuh KPRP. Hingga pada akhirnya dibuat kongres tertutup tahun 1960 di Phnom Penh. KPRP berganti nama menjadi Partai Pekerja Kamboja (*Worker Party of Kampuchea*–WPK). Kongres darurat lanjutan di Phnom Penh menetapkan Pol Pot sebagai Sekretaris Jenderal WPK.

Kemudian pada tahun 1966 WPK berganti nama menjadi Partai Komunis Kamboja (*Communist Party of Kampuchea* – CPK). Khmer Merah saat itu mulai menentang keras federasi Indocina yang dipelopori oleh Vietnam. Mereka menyatakan slogan anti Vietnam kepada kader-kader Khmer Merah. Khmer Merah tidak mengikuti anjuran dari Partai Komunis Indocina dan terus melancarkan pemberontakan. Khmer Merah tetap bersikukuh dengan revolusi Kamboja. Meski memang tidak semua kadernya mengikuti slogan tersebut. Seperti kader-kader Khmer Merah yang tetap pro terhadap Vietnam, di antaranya ialah Heng Samrin dan Hun Sen.

Sementara itu, secara internal pemerintahan di Kamboja sedang terjadi perebutan kekuasaan antar elit-elit politik. Di saat Sihanouk meninggalkan

Kamboja, Lon Nol mengambil peluang untuk bertindak bebas di situasi Kamboja yang sedang instabilitas tersebut. Hasilnya, pada 18 Maret 1970 diadakan sidang nasional. Sidang tersebut membuat Sihanouk dipecat sebagai kepala negara dan digantikan oleh Lon Nol. Lon Nol menjabat sebagai presiden sedangkan Sirik Matak sebagai wakil presidennya. Di saat Lon Nol berkuasa, sistem pemerintahan ia ubah, dari sistem monarki konstitusional menjadi sistem republik. Pergantian rezim tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di Kamboja, hal tersebut malah membuat situasi politik semakin memanas. Sihanouk pada akhirnya membuat koalisi dengan Khmer Merah untuk mengkuadeta Lon Nol dari kekuasaannya. Perang Indocina II sekaligus ditambah dengan perang saudara yang terjadi di Kamboja membuat pemerintahan Lon Nol terpuruk. Akhirnya, pada 17 April 1975, Khmer Merah berhasil melakukan kudeta terhadap pemerintahan Lon Nol yang semakin melemah.

Kamboja akhirnya dipimpin oleh kader-kader CPK, yaitu Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, Nuon Chea, dan lainnya. Kongres Nasional yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 1975 menyepakati sebuah undang-undang baru. Undang-undang terdiri dari 16 bab dengan memuat ayat-ayat di dalamnya. Konstitusi baru memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat dan politik Kamboja. Konstitusi tersebut menghapuskan monarki, mengakhiri agama Buddha sebagai agama resmi negara, mengambil alih semua perusahaan ekonomi swasta, dan membuat petani, pekerja dan anggota tentara sebagai proletariat yang berkuasa. Khmer Merah menjalankan pemerintahan di Kamboja dengan sistem kolusi yang jelas terlihat dari posisi-posisi kabinet dalam pemerintahannya. Selain itu, Khmer Merah memiliki sikap diktator yang sewenang-wenang. Hal ini dapat dilihat dari tempat yang dinamakan Tuol Sleng. Tuol Sleng atau S-21 merupakan tempat untuk penahanan, interogasi, penyiksaan, dan pemusnahan para tahanannya yang menentang atau berpeluang mengganggu pemerintahan rezim Khmer Merah.

Kemudian, perihal upaya-upaya yang dilakukan oleh Khmer Merah dalam menjalankan kebijakan *chhnam saun* di Kamboja (1975-1979). Terdapat dua unsur utama yang dilakukan Khmer Merah dalam mengimplementasikan kebijakan *chhnam saun* di Kamboja, yakni *Super Great Leap Forward* dan Revolusi Kebudayaan. Setelah berhasil menguasai Kamboja, Khmer Merah

mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai *Eight Points Plans*. Kedelapan poin tersebut menjadi sorotan luas dunia luar. Lebih-lebih mengenai evakuasi semua orang perkotaan menuju pedesaan dalam konteks membangun Kamboja menjadi negara swasembada beras. Pengosongan kota-kota merupakan salah satu penyebab utama terbesar dari kelaparan dan pembunuhan massal yang mengguncang negara Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979. Terlepas dari kurangnya tenaga kerja terampil, bahan baku, infrastruktur, dan keahlian profesional. Kamboja mencoba mengejar dan menyalip kapitalis Barat dengan modal kerja keras saja. Khmer Merah mengosongkan kota-kota untuk menghapuskan kehidupan kota dan membangun Kamboja baru berdasarkan kekuatan produksi beras di pedesaan. Pada awal 1976, Khmer Merah menyerukan kolektivisasi semua properti pribadi dan menempatkan prioritas nasional yang tinggi pada penanaman padi. Khmer Merah mengubah Kamboja menjadi negara agraris dengan mempekerjakan semua penduduk sebagai petani. Dengan mempekerjakan seluruh penduduk sebagai petani, Khmer Merah berharap kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Sehingga Kamboja tidak perlu melakukan impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Perintah evakuasi yang dilakukan oleh Khmer Merah membuat fungsi kota menjadi mati. Rezim yang memerintah memang tidak menghendaki adanya perkembangan di daerah perkotaan. Kota-kota yang berada di Kamboja dikosongkan. Hanya beberapa anggota Khmer Merah saja yang dibiarkan di daerah kota untuk keperluan pemerintahan.

Para pekerja tidak mendapatkan makanan yang memadai dan istirahat yang cukup karena mereka harus bekerja sepanjang waktu untuk mengolah lahan pertanian. Kejatuhan Khmer Merah ditandai dengan kegagalannya dalam merevolusi bidang pertanian. Khmer Merah menargetkan 3 ton beras dalam 1 hektare. Namun target tersebut sulit dicapai karena beberapa faktor, di antaranya ialah tidak menunjangnya peralatan pertanian. Para petani di masa pemerintahan Khmer Merah masih menggunakan sistem dan peralatan yang sederhana dalam mengelola lahan pertanian. Para pemimpin mengabaikan kesulitan dalam mengimplementasikan rencana ini dan kesengsaraan yang mengalir tak terhindarkan dari pekerjaan yang berlebihan, kondisi kehidupan yang buruk,

kekurangan gizi, kurangnya kebebasan, dan penyakit yang tidak diobati. Sepanjang periode mereka memerintah, kondisi kehidupan orang-orang sangat buruk. Selain itu, rezim Khmer Merah merenggut kebahagiaan dan martabat mereka. Kebanyakan orang tahu bahwa suatu negara membutuhkan orang-orang terdidik untuk berkembang. Namun, Khmer Merah membunuh banyak intelektual dan teknisi, dan menutup semua universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh negeri.

Saat Khmer Merah berkuasa, mereka melarang agama dan menghancurkan tempat-tempat ibadah yang ada di Kamboja. Agama yang paling banyak dicari ialah Buddha. Di samping itu, terdapat agama Islam yang sama-sama ditindas. Cham Muslim dipaksa untuk menyesuaikan diri dan tidak mematuhi agama mereka dengan dipaksa memakan daging babi dan melarang mereka menjalankan berbagai doktrin Islam. Selain itu, ditegaskan bahwa di Kamboja hanya terdapat satu bahasa, yaitu bahasa Khmer. Semua jenis kebangsaan pun tidak diperkenankan berada di Kamboja. Oleh karena itu, setiap orang (Cham) harus mengganti nama mereka dengan nama baru serupa dengan nama Khmer. Identitas etnis Cham (bahasa, pakaian, kebiasaan, dan agama) harus dihapuskan. Bagi siapa saja yang tidak mematuhi peraturan akan menerima konsekuensinya. Pemerintahan Khmer Merah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dengan imbalan keseragaman menuai banyak konsekuensi negatif.

Perihal reaksi akibat kebijakan *chhnam saun* terhadap kehidupan masyarakat Kamboja. Terjadinya pemberontakan terhadap Khmer Merah yang muncul dari perbedaan pendapat dan sikap diktator Khmer Merah. Orang yang menentang, menolak, atau mengkritik kebijakan dan perintah Khmer Merah dianggap sebagai pengkhianat. Pemberontakan dilakukan oleh kalangan yang berbeda-beda dan hampir terjadi di semua zona. Hilangnya jutaan nyawa di Kamboja tidak terlepas dari program *Super Great Leap Forward* dan revolusi kebudayaan yang diterapkan oleh rezim Khmer Merah. Hal tersebut membuat penduduk menderita dengan kekurangan makanan, sakt-sakitan, dan kelelahan hingga meninggal karena beban kerja yang berlebihan. Di samping itu, tindakan Khmer Merah yang paranoid dengan pihak di luar mereka, membuat korban yang

berjatuhan semakin banyak. Mereka mengimplementasi kebijakannya dipengaruhi oleh sentimen *xenophobia*.

Rezim Khmer Merah digulingkan oleh kekuatan gabungan Vietnam dan *Kampuchean National United Front of National Salvation* (KNUFNS). KNUFNS merupakan front yang terdiri dari kader-kader Khmer Merah yang berada di Vietnam. Mereka bertentangan dengan Khmer Merah dan sebagian pernah diburu karena hal tersebut. Jatuhnya Kamboja di tangan militer Vietnam disebabkan oleh rakyat Kamboja yang sudah tidak mendukung lagi pemerintahan Khmer Merah. Akhirnya Republik Rakyat Kampuchea (*People's Republic of Kampuchea—PRK*) didirikan pada 10 Januari 1979 di Kamboja. Heng Samrin diangkat menjadi presiden PRK dan memerintah sebagai penguasa Kamboja yang baru. Phnom Penh segera dibuat sebagai pusat pemerintahan boneka. Kompleksnya masalah Kamboja memaksa dunia internasional segera mencari solusi terbaik bagi penyelesaian konflik tersebut. Adapun usaha-usaha secara diplomasi dalam penyelesaian konflik di Kamboja yakni dengan diadakannya Jakarta Informal Meeting I, Jakarta Informal Meeting II, Konferensi Beijing, dan Konferensi Paris. Dengan serangkaian penyelesaian terhadap permasalahan Kamboja, pada akhirnya PBB mengeluarkan resolusi tentang tugas komunitas internasional untuk mencegah terulangnya genosida dan untuk tindakan kemanusiaan. Pada tanggal 23 Oktober 1991, Perjanjian Perdamaian Paris ditandatangani. Kamboja dan AS sama-sama menandatangani Konvensi Genosida dan mendukung upaya pertanggungjawaban pada tahun 1970-an.

5.2 Rekomendasi

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh peneliti berjudul Kebijakan *Chhnam Saun* Pada Masa Rezim Khmer Merah Terhadap Kehidupan Masyarakat Kamboja (1975-1979). Skripsi yang ditulis merupakan suatu kajian sejarah kawasan yang berkaitan dengan topik tentang kebijakan suatu negara di kawasan Indocina yang berdampak pada konflik internal dan multinasional. Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sejarah, umumnya pada sejarah kawasan Indocina, khususnya pada perkembangan sejarah Kamboja. Terutama memiliki kegunaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tema yang sama, namun dengan judul dan bahasan yang berbeda. Sebagai

contoh, peneliti menyarankan penelitian tentang perbandingan antara pemerintahan Khmer Merah dengan *People's Republic of Kampuchea* di Kamboja yang bagi peneliti menarik dan masih jarang diteliti.

Dalam pembelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya sejarah peminatan, peneliti masih jarang mendengar disampaikannya materi tentang kebijakan yang peneliti tulis. Atas dasar hal tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pendalaman materi sekaligus sumber rujukan dalam pembelajaran di kelas XII sejarah peminatan, KD 3.6 pada Bab Sejarah Kontemporer Dunia dengan topik mengenai Konflik Asia Tenggara (Kasus Indocina). Hal ini bermanfaat guna memahami peristiwa yang melibatkan banyak negara serta sebagai pembelajaran mengenai salah satu kasus kemanusiaan terbesar yang terjadi di abad 20. Di samping itu, penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya sumber literatur mengenai sejarah Kamboja dan Indocina, serta mampu menjadi bahan rujukan dalam mata kuliah seperti Sejarah Kebangkitan Negara-Negara Asia.

